

## MILITERISASI LAUT CHINA SELATAN

Poltak Partogi Nainggolan

7

### Abstrak

*Laut China Selatan (LCS) mengalami eskalasi ketegangan kembali setelah China mendaratkan pesawat pembomnya ke Paracels. Upaya China ini menandai peningkatan militerisasi LCS, kepulauan kaya minyak dan gas yang dipersengketakan akibat klaim teritorial yang tumpang tindih sejak dekade 1970. Reaksi bermunculan dari negara pengklaim yang terancam langsung, terutama Filipina, dan kekuatan besar dari luar kawasan, yakni Amerika Serikat (AS). Reaksi tidak hanya dalam bentuk pernyataan politik, tetapi juga dalam bentuk pengiriman kapal perang. Militerisasi LCS membawa implikasi keamanan regional yang membutuhkan solusi alternatif untuk menembus kebuntuan, akibat obsesi kepentingan dan sikap egois China yang tidak peduli dengan upaya diplomasi multilateral dan hukum internasional. Sebagai bagian dari negara di kawasan, Indonesia harus terus mendorong solusi multilateral atas LCS. Dalam hal ini, Pemerintah Joko Widodo dan parlemen (DPR) di berbagai forum internasional harus menyerukan China untuk mematuhi mekanisme hukum internasional demi terwujudnya solusi damai di LCS.*

### Pendahuluan

Perkembangan baru lingkungan strategis di Laut China Selatan terjadi kembali setelah pada 18 Mei 2018 sejumlah pesawat pembom (*bomber*) China untuk pertama kalinya melakukan pendaratan di sebuah landasan di pulau buatan China di wilayah yang dipersengketakan. Di antara pesawat-pesawat pembom yang mendarat itu adalah tipe H-6-K, yang mempunyai daya jelajah yang jauh dan memiliki kapabilitas untuk melancarkan perang nuklir. Pesawat pembom

tersebut melakukan pendaratan di Pulau Woody yang terletak di Kepulauan Paracels, yang sedang dipersengketakan dengan Vietnam dan Taiwan.

Sengketa saling klaim antara China dan 4 negara anggota ASEAN (Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam) dan Taiwan telah berlangsung sejak beberapa dasawarsa, dan mulai menonjol pada dasawarsa 1970 sampai dewasa ini. Konflik saling klaim mulai memanas ketika China membangun pulau buatan di



LCS, terutama Paracels, dengan sejumlah fasilitas militer, antara lain pos-pos militer untuk penjagaan dan pengintaian, landasan udara, pelabuhan, sistem radar, dan pertahanan rudal. Sedangkan Subi di Spratlys akan menjadi markas militer China di jantung maritim Asia Tenggara.

LCS mencakup wilayah seluas lebih dari 3 juta kilometer persegi yang merupakan jalur penghubung yang sangat vital bagi banyak negara untuk mengangkut kebutuhan logistik negara mereka. Perairan ini termasuk yang tersibuk di dunia karena terletak di persimpangan jalur perairan internasional, antara Samudera Pasifik dan Hindia. Volume perdagangan yang melintasi kawasan perairan ini bernilai 5 triliun dolar AS setiap tahunnya. Wilayah perairan ini kaya dengan kandungan minyak dan gas alam yang menjadi incaran banyak negara, terutama China, yang haus energi demi mempertahankan pertumbuhan ekonominya secara optimal (Nainggolan, 2013: 53).

Secara khusus, blok minyak di perairan sepanjang pantai Vietnam yang berada di dalam wilayah LCS selama ini diklaim oleh Vietnam, sehingga negara itu telah melakukan pengeboran minyak. Letaknya berdekatan dengan *Red Emperor Block* milik China, yang telah memunculkan tekanan Pemerintah China. Vietnam sempat menghentikan pengeboran minyak di area ini, yang sangat berarti bagi perekonomian negerinya. Petro Vietnam telah memberikan pemasukan 20% bagi Produk

Domestik Bruto dan 30% bagi total pemasukan pendapatan nasional negeri itu sejak 1986-2009. Vietnam memiliki 3,3 miliar dan 4,4 miliar barel cadangan minyak mentah dan gas di 2 lokasi perairan di sana (*Jakarta Post*, 24 Mei 2018).

China telah memperkirakan cadangan minyak di LCS sebesar 213 miliar barel, 10 kali lipat dari cadangan minyak AS. Sejalan dengan itu, China telah mengklaim keseluruhan area LCS sebagai miliknya. Dalam beberapa tahun terakhir, China mulai melakukan militerisasi LCS secara serius dan besar-besaran. Perkembangan ini akan memberi risiko yang amat membahayakan sehingga patut dicermati apa implikasi langkah China itu terhadap stabilitas keamanan di kawasan, dan bagaimana reaksi negara-negara yang berkepentingan. Apakah respons yang diberikan akan efektif dan bagaimana solusi alternatif yang bisa dilakukan untuk mencegah okupasi dan kontrol sepihak China atas LCS?

### Reaksi Berbagai Negara

Menurut Pemerintah Filipina, upaya militerisasi LCS oleh China berdampak terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Secara khusus, pihak Kementerian Luar Negeri Filipina memantau perkembangan yang terus terjadi. Pihaknya akan mengambil langkah yang diperlukan demi melindungi klaim mereka di LCS yang bertentangan dengan klaim China.

Di balik kekhawatiran terhadap kekuatan militer China, Presiden Filipina berupaya menghindari perang, meskipun jika terpaksa, ia juga mengingatkan,

Filipina tidak bisa berdiam diri, namun harus siap menghadapinya. Walaupun berupaya menunjukkan sikap tenang, Presiden Duterte telah menyampaikan sikap keprihatinan yang serius. Ungkapan '*Bahala na*', dalam bahasa Tagalog yang disampaikannya memberi makna Filipina siap untuk berperang. Kalangan oposisi di Senat Filipina menanggapi sikap China dengan lebih agresif. Mereka mengatakan walaupun Filipina sulit mengimbangi kekuatan China, tetapi negaranya harus dapat memberikan reaksi penangkal terhadap "si penyerang", sehingga Filipina dapat segera menghentikan perilaku China yang mengganggu.

AS, yang selama beberapa dasawarsa menjadi seteru China dan patron Filipina dalam era Perang Dingin, adalah negara besar pertama yang memberikan reaksi tegas. Pemerintah AS menyatakan bahwa langkah China yang terus melakukan militerisasi LCS mendestabilisasi kawasan. AS pun segera mengirimkan kapal perusak USS Higgins dan kapal penjelajah USS Antietam yang dilengkapi misil ke wilayah yang dipersengketakan di Paracels, terutama Kepulauan Woody di LCS. AS tidak menanggapi seruan China agar tidak mengirimkan armada lautnya ke sana, sehingga AS tetap melanjutkan operasi pelayarannya ke LCS demi mempertahankan kebebasan navigasi di jalur perairan internasional dan kepentingannya.

### **Implikasi Keamanan**

Perburuan energi di LCS secara realistis telah meningkatkan eskalasi ketegangan. Militerisasi

LCS oleh China dengan penempatan pesawat-pesawat *bomber* dan pembuatan 2 kapal induk bertenaga nuklir sekaligus untuk mengawal LCS, menjadi faktor pemicu kembali terjadinya eskalasi. Kapal induk *Liaoning* sudah beroperasi sejak tahun 2012 dan satu kapal induk lagi mulai tahun 2020, yang masing-masing bisa membawa 40 pesawat tempur. Ini menempatkan China sejajar dengan negara besar pemilik kapal induk lainnya, AS dan Rusia.

Eskalasi ini bersifat kumulatif dan tidak mudah segera kembali normal, karena langkah yang dilakukan China telah menjadi bagian dari *roadmap* dan skenario jangka panjangnya untuk menguasai dan mengontrol perkembangan strategis LCS. Jika situasi ini belangsung terus, stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan dapat terganggu. Dilihat dari perspektif keamanan yang lebih luas, implikasi yang tercipta dapat menyebabkan terganggunya lalu-lintas logistik internasional.

Eskalasi ketegangan yang tercipta secara kumulatif dapat semakin memicu kenaikan harga minyak di pasar internasional yang akhir-akhir ini terus mengalami kenaikan, hingga 72,46 dolar AS per barel (perhitungan CPI Indonesia, *detik.com*, 6 Juni 2018). Kenaikan akan semakin drastis jika konflik terbuka muncul dan mengakibatkan pasokan minyak dan gas dunia mulai terganggu, terutama di musim dingin. Harga minyak dunia akan meningkat cepat jika konflik dengan intensitas tinggi terjadi di perairan tersebut.

Pemerintah Filipina segera menyampaikan keprihatinannya yang sangat serius karena merasa terancam langsung. Sikap Presiden Duterte yang sempat berubah ekstrim menjadi lunak, tidak menindaklanjuti keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang telah memenangkan klaim Filipina, dikecam anggota Senat dari partai oposisi. Presiden Duterte sebenarnya khawatir dengan perkembangan terakhir, sebab dengan kemampuan hipersoniknya, pesawat H-6K China bisa menjangkau Manila hanya dalam tempo 7-10 menit.

Terkait China, LCS berbeda dengan Semenanjung Korea, di mana China tidak memiliki kepentingan langsung, sehingga di Semenanjung Korea, Korea Utara bisa menurunkan sikap agresifnya, sementara di LCS, China tidak bisa. Hal ini berhubungan dengan kepentingan langsung ekonomi China dalam menopang kemajuannya di masa depan, khususnya keamanan energi negara itu. Dalam menghadapi LCS, China akan mempertahankannya secara sungguh-sungguh dengan terencana dan sistematis. Untuk menghadapi skenario terburuk, China telah menyiapkan 2 kapal induk untuk mempertahankan LCS.

Langkah agresif China, sebagai konsekuensinya, akan menarik armada Angkatan Laut AS untuk semakin merapat ke LCS dan meningkatkan kerja sama dan latihan militer dengan negara-negara yang memiliki klaim tumpang-tindih dengan China. Perilaku agresif China di LCS akan berimplikasi pada perubahan kebijakan AS untuk kembali meningkatkan kekuatannya di

sana. Secara terpaksa, Pemerintah Trump akan memalingkan kembali perhatiannya ke Asia Tenggara, khususnya LCS.

Perkembangan lingkungan strategis di LCS juga akan menarik Jepang dan India untuk masuk mencari pengaruh di Asia Tenggara. Oleh karena itu LCS memberi makna penting bagi kepentingan nasional masing-masing negara besar di kawasan itu. Bagi Jepang, serupa dengan kepentingannya di masa Perang Dunia II, dan kepentingan AS, LCS merupakan jalur logistik dan penjamin kebutuhan (keamanan) energinya.

### **Solusi Alternatif**

Dunia, terutama negara-negara di kawasan yang terlibat klaim tumpang-tindih di LCS harus mempertahankan solusi damai melalui mekanisme hukum internasional. Keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 yang membenarkan posisi Filipina dan menyatakan langkah China di wilayah yang diklaim Filipina sebagai ilegal, harus dipatuhi China. Solusi melalui mekanisme hukum dan pengadilan internasional itu dapat menjadi model untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa, dan harus didukung masyarakat dunia. Dengan demikian, China akan terisolasi jika tidak mematuhi, dan instabilitas keamanan di LCS dan kawasan dapat dicegah ke situasi yang lebih buruk.

Di sisi lain, masyarakat internasional, terutama negara-negara di kawasan, harus mendorong China untuk mencari solusi secara multilateral dan

mematuhi hukum internasional. Seperti yang dilakukan Eropa terhadap Rusia, politik pembendungan (*containment policy*) dan pengasingan (isolasi) dapat kembali diaplikasikan dan efektif untuk memaksa China mengikuti solusi damai, dan sebaliknya, tidak memaksakan kehendaknya dengan ancaman kekuatan militer.

### Penutup

AS dan ASEAN harus mendorong pendekatan multilateralisme baru untuk menekan China dalam mencari solusi damai atas klaim tumpang-tindih di LCS. Untuk kepentingan ini, Jepang dan India, dua seteru tradisional China, perlu diajak bergabung untuk memperkuat barisan 'blok demokratis', atau aliansi AS-Jepang-India, yang cukup diperhitungkan dan disegani China akhir-akhir ini di kawasan.

Sayangnya, ASEAN, apalagi perhimpunan parlemennya, yakni AIPA, tetap sulit diharapkan bisa berjalan sendiri dengan pendekatan multilateralismenya untuk menekan China. Oleh karena itu, mereka harus berada dalam satu barisan dengan masyarakat dunia untuk menekan China. Mereka harus semakin sering menyuarakan pendekatan multilateral bagi solusi konflik di LCS dalam berbagai forum internasional. Dengan membangun 'blok demokratis' ini, China tidak bisa sesuka hatinya dalam mengimplementasikan keinginannya di Asia Tenggara, khususnya di LCS.

Secara unilateral, Indonesia juga harus terus mendorong

solusi multilateral atas LCS untuk menurunkan eskalasi ketegangan. Dalam hal ini, Pemerintah Joko Widodo dan parlemen (DPR) di berbagai forum internasional harus mempertanyakan dan mengkritisi upaya China memiliterisasi LCS, dan menyerukan negeri itu untuk mematuhi mekanisme hukum internasional demi terwujudnya solusi damai di LCS.

### Referensi

- Ali, Idrees. "US to continue operations in South China Sea: Mattis". *The Jakarta Post*, May 31, 2018, hal. 11.
- Mogato, Manuel. "PH taking 'appropriate action' over bombers in SCS". *The Jakarta Post*, 22 Mei 2018, hal. 10.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2013. "Kepentingan Strategis Amerika Serikat di Asia Pasifik, Khususnya Indonesia", dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed.), *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: Azza Grafika, hal. 43-65.
- Nursya'bani, Fira. "Subi, Sang Calon Markas Militer China". *Republika*, 25 Mei 2018, hal. 7.
- Pearson, James and Greg Torode. "Risky hunt for black gold in Vietnam's oil Blocks". *The Jakarta Post*, 24 Mei, 2018, hal. 10.
- Ramos, Marlon. "Duterte ready for war in SCS, says top diplomat". *The Jakarta Post*, 30 Mei 2018, hal. 10.
- "Sengketa LTS: Dua Kapal Perang AS Berlayar Dekat Kepulauan Paracels, Filipina Perbaiki Landasan di Thitu", *Koran Jakarta*, 28 Mei 2018, hal. 8.

"US warships sail near SCS islands", *The Jakarta Post*, 28 Mei 2018, hal. 10.



*Poltak Partogi Nainggolan*  
*partogi.nainggolan@dpr.go.id*  
*pptogin@yahoo.com*

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert-Ludwids-Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan judicium magna cumlaude. Beliau adalah seorang Profesor Riset untuk masalah-masalah hubungan internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Kemitraan Strategis Indonesia - Amerika Serikat - RRC di Asia Pasifik" (2013), "Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis" (2015), dan "Ancaman Keamanan terhadap ALKI" (2015).

#### **Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*